



KABUPATEN
PANGANDARAN

RENJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

(0265) 2641177
inspektorat0713@gmail.com
Jalan Raya Cijulang Dusun Karangbenda
Rt. 03 Rw. 01 Parigi 44393





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
I N S P E K T O R A T

Jl. Raya Cijulang Desa Karangbenda, Parigi 46393
Telepon, (0265) 2641177, Faks, (0265) 2641177
Surel: inspektorat0713@gmail.com; Website: <https://inspektorat.pangandarankab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR: PR.04.02/Kpts 013-Insp/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun untuk memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta permasalahan yang dihadapi;

- c. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangandaran tentang Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
 33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024

tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 45);
50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024
Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.
- KEDUA : Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan berpedoman kepada Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- KETIGA : Renja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)–SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2025.
- KEEMPAT : Sistematisa Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, yaitu:
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun Lalu
 - Bab III : Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran
 - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Pangandaran
 - Bab V : Penutup
- KELIMA : Renja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Pangandaran.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun 2025, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Juli 2024

A.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR



H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.PT.,MP

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pangandaran;
2. Yth. Wakil Bupati Pangandaran;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pangandaran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Inspektorat. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Inspektorat disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Inspektorat. Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Inspektorat tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 15 Juli 2024

Pt. INSPEKTUR

KABUPATEN PANGANDARAN



H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., M.P

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660902 199601 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN	
TAHUN 2023.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran	28
2.2.1 Indikator Kinerja Nilai Sakip	28
2.2.2 Indikator “Tingkat Maturitas SPIP”	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	33
2.3.1 Pelayanan Inspektorat	33
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	35
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional	35
2.3.4 Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025	37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN.....	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	49
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat.....	50
3.3 Program dan Kegiatan	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025	61
BAB V PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat.....	21
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pangandaran	22
Tabel 2.3	Sasaran Strategi Inspektorat	28
Tabel 2.4	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran	28
Tabel 2.5	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	30
Tabel 2.6	Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	30
Tabel 2.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran.....	32
Tabel 2.9	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pangandaran.....	38
Tabel 2.10	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Pangandaran.....	45
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2025	51
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Pangandaran.....	52
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Inspektorat merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Inspektorat memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Inspektorat 2025 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Inspektorat ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan

Rancangan Awal Renja Inspektorat yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun lalu dan evaluasi hasil Inspektorat tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Inspektorat; pembahasan Rancangan Renja Inspektorat; perumusan Rancangan Akhir Renja Inspektorat; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Inspektorat.

Renja Inspektorat Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat untuk tahun Ke empat periode Renstra Inspektorat 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Inspektorat Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Inspektorat mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2025, Renstra Inspektorat, Renja K/L dan Renja Provinsi Jawa Barat. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Inspektorat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 45);
50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Inspektorat dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran 2025 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Inspektorat adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana;
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Inspektorat;

- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Inspektorat, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat, proses penyusunan Renja Inspektorat, keterkaitan antara Renja Inspektorat dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, tabel rencana program dan kegiatan dan perkiraan maju.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direcanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan, uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat. Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Inspektorat tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan,

pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2023, ada program dan kegiatan Inspektorat yang tidak melebihi target kinerja yang telah direncanakan yaitu sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja sebanyak 5 Laporan atau capaiannya sebesar 83,33% dari target yang ditetapkan sebanyak 6 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.268.000,00 atau capaiannya sebesar 38,27% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.700.250,00;
 - I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kinerja sebanyak 38 Orang atau Capaiannya sebesar 95,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 40 Orang Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.4.723.337.373,00 atau Capaiannya sebesar 78,33% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.6.029.909.593,00;
 - I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian kinerja sebanyak 31 Orang atau Capaiannya sebesar 77,50% dari target yang ditetapkan sebanyak 40 Orang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.450.345.190,00 atau Capaiannya sebesar 80,44% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.559.859.500,00;
 - I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian kinerja sebanyak 10 Dokumen atau Capaiannya sebesar 83,33% dari target yang

ditetapkan sebanyak 12 Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.7.455.000,00 atau Capaiannya sebesar 54,67% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.13.637.400,00;

2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja sebanyak 36 Laporan atau Capaiannya sebesar 90,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 40 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.105.714.082,00 atau Capaiannya sebesar 85,70% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.123.355.073,00;

I.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian kinerja sebanyak 20 Unit atau Capaiannya sebesar 68,97% dari target yang ditetapkan sebanyak 29 Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.4.545.000,00 atau Capaiannya sebesar 50,50% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.9.000.000,00

- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dilaksanakan melalui sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 9 Laporan atau Capaiannya sebesar 90,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 10 Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.38.220.000,00 atau Capaiannya sebesar 67,96% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.56.235.400,00.

Beberapa program dan kegiatan Inspektorat diatas tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jumlah aparat pengawasan;
2. Belum efektifnya perencanaan dan penganggaran untuk pengawasan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan;
4. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah.

Adapun program dan kegiatan Inspektorat dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan

capaian kinerja sebanyak 13 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 13 Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.14.226.000,00 atau Capaiannya sebesar 58,04% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.24.508.900,00;

I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 28 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 28 Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.13.696.500,00 atau Capaiannya sebesar 64,92% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.21.098.000,00;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Laporan atau capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.143.000,00 atau Capaiannya sebesar 54,37% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.263.000,00;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Laporan atau capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.180.000,00 atau Capaiannya sebesar 72,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.250.000,00;

I.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 23 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 23 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.13.880.000,00 atau Capaiannya sebesar 65,23 dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.21.280.000,00;

I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi

Kepegawaian, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.11.200.000,00 atau Capaiannya sebesar 64,37% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.17.400.000,00;

I.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Paket atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.497.500,00 atau Capaiannya sebesar 45,33% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.1.097.500,00;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Paket atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.23.927.986,00 atau Capaiannya sebesar 74,24% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.32.230.004,00;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian kinerja sebanyak 3 Paket atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 3 Paket Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.4.559.349,00 atau Capaiannya sebesar 52,71% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.8.650.000,00;
4. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.11.200.000,00 atau Capaiannya sebesar 64,37% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.17.400.000,00;

I.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Pengadaan Mebeul, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Paket atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.0,00 atau Capaiannya sebesar 0,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.129.624.400,00;
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian kinerja sebanyak 5 Unit atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 5 Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan penyerapan anggaran sebesar

Rp.43.200.000,00 atau Capaiannya sebesar 100% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.43.200.000,00;

3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Unit atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Unit Pelaksanaan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.154.179.000,00 atau Capaiannya sebesar 100% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.154.179.000,00;

I.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.872.000,00 atau Capaiannya sebesar 83,85% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.1.040.000,00;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.44.384.059,00 atau Capaiannya sebesar 59,84% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.74.175.696,00;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.73.512.700,00 atau Capaiannya sebesar 62,07% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.118.441.482,00;

I.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Unit atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Unit Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.20.993.500,00 atau Capaiannya sebesar 69,98% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,00;

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Unit atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Unit Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.42.163.469,00 atau Capaiannya sebesar 22,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.191.670.000,00;
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 14 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 14 Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.30.584.500,00 atau Capaiannya sebesar 27,29% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.112.060.500,00;
 2. Reviu Laporan Kinerja, dengan capaian kinerja sebanyak 75 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 75 Laporan Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.77.900.500,00 atau Capaiannya sebesar 79,11% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.98.467.840,00;
 3. Reviu Laporan Keuangan, dengan capaian kinerja sebanyak 75 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 75 Laporan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.49.910.500,00 atau Capaiannya sebesar 56,24% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.88.739.060,00;
 4. Pengawasan Desa, dengan capaian kinerja sebanyak 8 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 8 Laporan Pelaksanaan Pengawasan Desa, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.303.000,00 atau Capaiannya sebesar 0,21% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.142.729.280,00;
 5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.10.720.400,00

atau Capaiannya sebesar 7,91% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.135.481.200,00;

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 36 Perangkat Daerah atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 36 Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.4.470.000,00 atau Capaiannya sebesar 2,57% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.173.989.900,00;
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan capaian kinerja sebanyak 10 Perangkat Daerah atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 10 Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.0,00 atau Capaiannya sebesar 0,0% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.30.292.200,00;
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan capaian kinerja sebanyak 4 Kegiatan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 4 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.264.748.000,00 atau Capaiannya sebesar 75,84% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.349.070.157,00;
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan capaian kinerja sebanyak 4 Perangkat Daerah atau Capaiannya Sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 4 Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.6.126.000,00 atau Capaiannya sebesar 20,26% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.30.236.200,00;

Beberapa program dan kegiatan Inspektorat diatas dapat mencapai target kinerja, tetapi penyerapan anggaran tidak maksimal, dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan untuk melakukan pengawasan;
2. Adanya SOP pengawasan;
3. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

4. Motivasi kerja pegawai cukup tinggi;
5. Kondisi Kas Daerah yang rendah, sehingga penyerapan anggaran dihutangkan ke Tahun 2024.

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Dari hasil evaluasi yang telah melebihi capaian target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

I. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan :

II.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 18 Laporan atau Capaiannya sebesar 105,88% dari target yang ditetapkan sebanyak 17 Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.56.286.500,00 atau Capaiannya sebesar 51,04% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.110.271.000,00;

II.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dilaksanakan melalui sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan capaian kinerja sebanyak 22 Laporan atau Capaiannya sebesar 115,79% dari target yang ditetapkan sebanyak 19 Laporan Pelaksana Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.57.425.000,00 atau Capaiannya sebesar 18,12% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.316.828.800,00;

Beberapa program dan kegiatan Inspektorat diatas yang capaian kinerjanya melebihi target dikarenakan adanya penugasan diluar PKPT atas Perintah Kepala Daerah, sedangkan penyerapan anggaran tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah rendah, dan penyerapan anggaran dihutangkan di Tahun 2024.

Tabel 2.1
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat

No	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.	Belum optimalnya jumlah aparatur pengawasan;	Adanya kewenangan untuk melakukan pengawasan;	dikarenakan adanya penugasan diluar PKPT atas Perintah Kepala Daerah, sedangkan penyerapan anggaran tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah rendah.	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan;
2.	Belum efektifnya perencanaan dan penganggaran untuk pengawasan;	Adanya SOP pengawasan;		Efektifnya perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan indikator peningkatan kapabilitas APIP;
3.	Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan.	Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);		Manajemen mutu dalam memproses dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
4.	Kemampuan Kas Daerah Rendah	Motivasi kerja pegawai cukup tinggi;		Implementasi budaya kerja yang telah ditetapkan secara konsisten;

No	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
5.				Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengawasan;
6.				Pendekatan dan pembinaan terhadap objek pemeriksaan;
7.				Manajemen Pengawasan Berbasis Resiko.
8.				Penyerapan Anggaran dihutangkan, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang prioritas dan rasionalisasi anggaran

Sumber:

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Pangandaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik 3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur 4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen	90 Persen 90 Persen 90 Persen 90 Persen	90,00 Persen 90,00 Persen 90,00 Persen 90,00 Persen	84,29 Persen 88,24 Persen 77,50 Persen 91,67 Persen	93,66% 98,04% 86,11% 101,85%	92 Persen 92 Persen 92 Persen 92 Persen	46 Persen 37 Persen 43 Persen 34 Persen	48,42% 38,95% 45,26% 35,79%
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95 Persen 95 Persen 95 Persen	90 Persen 90 Persen 90 Persen	90,00 Persen 90,00 Persen 90,00 Persen	100,00 Persen 90,00 Persen 83,33 Persen	111,11% 100,00% 92,59%	92 Persen 92 Persen 92 Persen	31 Persen 50 Persen 20 Persen	32,63% 52,63% 21,05%
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80 Dokumen	28 Dokumen	13,00 Dokumen	13,00 Dokumen	100,00%	13 Dokumen	4 Dokumen	5,00%
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0,00 Laporan	0,00 Laporan	0,00%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0,00 Laporan	0,00 Laporan	0,00%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
I.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0,00 Laporan	0,00 Laporan	0,00%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
I.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0,00 Laporan	0,00 Laporan	0,00%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31 Laporan	2 Laporan	6.00 Laporan	5.00 Laporan	83.33%	6 Laporan	2 Laporan	6.45%
I.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	0 Laporan	0.00 Laporan	0.00 Laporan	0.00%	4 Laporan	0 Laporan	0.00%
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	170 Dokumen	98 Dokumen	34.00 Dokumen	34.00 Dokumen	100.00%	34 Dokumen	7 Dokumen	4.12%
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	232 Orang	73 Orang	38.00 Orang	38.00 Orang	100.00%	40 Orang	35 Orang	15.09%
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	152 Dokumen	97 Dokumen	28.00 Dokumen	28.00 Dokumen	100.00%	28 Dokumen	33 Dokumen	21.71%
I.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Dokumen	1 Dokumen	4.00 Laporan	1.00 Dokumen	25.00%	2 Laporan	1 Laporan	9.09%
I.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21 Laporan	0 Laporan	12.00 Laporan	1.00 Laporan	8.33%	4 Laporan	- Laporan	0.00%
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah	222 Laporan	52 Laporan	26.00 Laporan	23.00 Laporan	88.46%	26 Laporan	12 Laporan	5.41%
I.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	0 Laporan	1.00 Dokumen	0 Laporan	0.00%	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
I.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	70 Laporan	0 Laporan	12.00 Laporan	0 Laporan	0.00%	14 Laporan	6 Laporan	8.57%
I.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	142 Laporan	52 Laporan	23.00 Laporan	23.00 Laporan	100.00%	26 Laporan	6 Laporan	4.23%
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284 Dokumen	77 Dokumen	50.00 Dokumen	12.00 Dokumen	24.00%	52 Dokumen	19 Dokumen	6.69%
I.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	72 Laporan	24 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12 Laporan	6 Laporan	8.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	198 Dokumen	0 Dokumen	2.00 Dokumen		0.00%	40 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
I.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	212 Orang	53 Orang	40.00 Orang	31.00 Orang	77.50%	40 Orang	14 Orang	6.60%
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah	25 Paket	7 Paket	5.00 Paket	5.00 Paket	100.00%	5 Paket	2 Paket	8.00%
		2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	20 Dokumen	8 Dokumen	4.00 Dokumen	3.00 Dokumen	75.00%	4 Dokumen	3 Dokumen	15.00%
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	1.00 Paket	1.00	100.00%	1 Paket	0 Paket	0.00%
I.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00%	1 Paket	1 Paket	20.00%
I.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	5 Paket	1.00 Paket	3.00 Paket	300.00%	3 Paket	0 Paket	0.00%
I.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	24 Dokumen	12.00 Dokumen	10.00 Dokumen	83.33%	12 Dokumen	6 Dokumen	10.00%
I.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	0 Laporan	6.00 Laporan	0.00	0.00%	12 Laporan	6 Laporan	10.00%
I.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204 Laporan	67 Laporan	40.00 Laporan	36.00 Laporan	90.00%	Laporan 40	13 Laporan	6.37%
I.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	24 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	100.00%	Dokumen 12	6 Dokumen	10.00%
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	90 Persen	90 Persen	90.00 Persen	90.00 Persen	100.00%	92 Persen	14.29 Persen	15.87%
I.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00%	1 Paket	0 Paket	0.00%
I.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0 Unit	6.00 Unit	5.00 Unit	83.33%	12 Unit	0 Unit	0.00%
I.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	1.00 Unit	1.00 Unit	100.00%	1 Unit	1 Unit	100.00%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Laporan	90 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12 Laporan	6 Laporan	50.00%
I.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24 Jenis	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12 Laporan	6 Laporan	50.00%
I.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24 Rekening	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12 Laporan	6 Laporan	50.00%
I.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12 Laporan	6 Laporan	50.00%
I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi	43 Unit	90 Unit	33.00 Unit	33 Unit	100.00%	123 Unit	19 Unit	44.19%
I.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	1.00 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit	1 Unit	100.00%
I.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	24 Unit	12.00 Unit	12 Unit	100.00%	12 Unit	12 Unit	100.00%
I.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0.00 Unit	0 Unit	0.00%	0 Unit	0 Unit	0.00%
I.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	37 Unit	20.00 Unit	20 Unit	100.00%	38 Unit	6 Unit	14.29%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	81.25 Nilai	58.57 Nilai	69.25 Nilai	64.82 Nilai	93.60%	72 Nilai	0 Nilai	0.00%
		Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	3.3 Nilai	3.12 Nilai	3.10 Nilai	3.36 Nilai	108.39%	3 Nilai	0 Nilai	0.00%
II.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja dan Pengawasan Keuangan	219 Laporan	22.00 Laporan	30.00 Laporan	32.00 Laporan	106.67%	30 Laporan	0 Laporan	0.00%
		2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal	42 Laporan	12.00 Laporan	9.00 Laporan	5.00 Laporan	55.56%	4 Laporan	0 Laporan	0.00%
		3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	60 Laporan	24.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12 Laporan	2 Laporan	3.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
II.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	95 Laporan	6.00 Laporan	4.00 Laporan	14.00 Laporan	350.00%	22 Laporan	1 Laporan	1.05%
II.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 Laporan	16.00 Laporan	8.00 Laporan	18.00 Laporan	225.00%	8 Laporan	6 Laporan	12.00%
II.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	372 Laporan	4.00 Laporan	2.00 Laporan	75.00 Laporan	3750.00%	74 Laporan	0 Laporan	0.00%
II.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	201 Laporan	4.00 Laporan	2.00 Laporan	75.00 Laporan	3750.00%	40 Laporan	2 Laporan	1.00%
II.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	202 Laporan	4.00 Laporan	2.00 Laporan	8.00 Laporan	400.00%	40 Laporan	0 Laporan	0.00%
II.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10 Laporan	0.00 Laporan	1.00 Laporan	0.00 Laporan	0.00%	2 Laporan	40 Laporan	400.00%
II.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	72 Laporan	24.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12 Laporan	1 Laporan	1.39%
II.2	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	227 Laporan	52.00 Laporan	26.00 Laporan	31.00 Laporan	119.23%	42 Laporan	3 Laporan	1.32%
II.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	54 Laporan	20.00 Laporan	10.00 Laporan	9.00 Laporan	90.00%	10 Laporan	0 Laporan	0.00%
II.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	173 Laporan	32.00 Laporan	16.00 Laporan	22.00 Laporan	137.50%	32 Laporan	3 Laporan	1.73%
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2. Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	82.00 Nilai 24 Unit Kerja	67.71 Nilai 4 Unit Kerja	65.00 Nilai 4.00 Unit Kerja	56.48 Nilai 4 Unit Kerja	86.89%	75 Nilai 4 Unit Kerja	0 Nilai 0 Unit Kerja	0.00%
III.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan	10.00 Dokumen	0 Dokumen	2.00 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
III.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5.00 Rekomendasi	0 Rekomendasi	1.00 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0.00%	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0.00%
III.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5.00 Rekomendasi	0 Rekomendasi	1.00 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0.00%	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0.00%
III.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan Money	285 Laporan	14 Laporan	54.00 Laporan	54.00 Laporan	100.00%	54 Laporan	4 Laporan	1.40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
III.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	180 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	36.00 Perangkat Daerah	36.00 Perangkat Daerah	100.00%	36 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0.00%
III.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	10.00 Perangkat Daerah	10.00 Perangkat Daerah	100.00%	10 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0.00%
III.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	32 Kegiatan	24 Kegiatan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	100.00%	4 Kegiatan	2 Kegiatan	6.25%
III.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	22 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	4.00 Perangkat Daerah	4.00 Perangkat Daerah	100.00%	4 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	9.09%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Sasaran Strategi Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Nilai SAKIP	69,25-72,00	67,99	98,18%
	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100 %

Sumber : LKJIP Inspektorat Tahun 2023

2.2.1 Indikator Kinerja Nilai Sakip

Target Nilai SAKIP pada tahun 2023 adalah 69,25 - 72,00. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kemenpan RB Nomor: B/309/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023, pada tahun 2023 Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai 67,99 atau berpredikat B (Baik) sehingga capaian tahun 2023 untuk indikator ini yaitu 98,18%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{67,99}{69,25} \times 100 = 98,18\%$$

Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran

No	Komponen Yang dinilai	Bobot (%)	Nilai Evaluasi (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,15
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,81

No	Komponen Yang dinilai	Bobot (%)	Nilai Evaluasi (%)
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,56
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,47
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,99
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B (Baik)	

Sumber: Kemenpan-RB, 2023

2.2.2 Indikator “Tingkat Maturitas SPIP”

Target Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tahun 2023 adalah Level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023, pada tahun 2023 Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai 3,039 atau Level 3 (Terdefinisi) sehingga capaian tahun 2023 untuk indikator ini yaitu 100,00%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{3}{3} \times 100 = 100,00\%$$

Rincian Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Pangandaran tertera pada tabel berikut:

Gambar 2.1
Hasil Evaluasi per Fokus Penilaian

Hasil Penilaian Mandiri		Fokus Penilaian		Hasil Evaluasi		Naik/Turun
3,7947	➡	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	➡	3,039	➡	Turun
4,123	➡	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	➡	3,352	➡	Turun
3,36	➡	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	➡	2,43	➡	Turun

Sumber: LHE BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
I.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	69.25 - 72.00	67,99	98,18	8.683.782.878	6.085.830.108	70,08	28,10
I.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	17,33	17,47	100,81	1.060.813.080	321.350.400	30,29	70,52
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	71,50	71,05	99,37	7.622.969.798	5.764.479.708	75,62	23,75
I.2		Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	583.588.457	275.344.000	47,18	52,82
I.2.1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	583.588.457	275.344.000	47,18	52,82

Bagian yang disajikan dalam tabel tersebut diatas terkait dengan capaian kinerja dan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran dimana dari sisi capaian kinerjanya terlihat 1 (satu) indikator sasaran yang mencapai lebih dari 100%, 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran yang menunjukkan pencapaian sama dengan 100%, dan 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran strategis yang menunjukkan pencapaian kurang dari 100%. Namun demikian dari sisi efisiensi pengguna sumber daya terdapat efisiensi anggaran disetiap indikator tujuan/sasaran. Kondisi ini sudah sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	100,81	321.350.400	30,29
		Komponen Evaluasi Internal	99,37	5.764.479.708	75,62
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100,00	275.344.000	47,18
JUMLAH/RATA-RATA			100,06	6.361.174.108	68,64

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi anggaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efektif dan efisien menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	100,81	30,29	70,52
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	99,37	75,62	23,75
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100,00	47,18	52,82

Dari tabel di atas dari sasaran yang dimiliki Inspektorat terjadi efisiensi paling rendah 23,75 dan paling tinggi 70,52 .

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ Standar Nasional (3)	IKK (4)	Target Renstra Inspektorat			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	2021 (10)	2022 (11)	2023 (12)	2024 (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal		Nilai	7,45	7,60	17,33	18,25	7,39	17,33	17,47	18,25	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat		Nilai	66,95	68,20	71,50	74,50	89,34	64,50	71,05	71,05	
3	Tingkat Maturitas SPIP		Level		3	3	3	-	3	3	3	
4	Tingkat Kapabilitas APIP		Level	2	-	-	-	2	2	3	-	
5	Presentase OPD yang mengimplementasikan Manajemen Risiko		Persen	n.a	-	-	-	-	-	-	-	
6	Presentase OPD yang membuat Kebijakan dan Pengendalian Korupsi		Persen	n.a	-	-	-	-	-	-	-	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Terjadi temuan berulang dibidang fisik dan non fisik sarana prasarana terkait nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD;
2. Evaluasi implementasi SPIP belum dilaksanakan secara menyeluruh;
3. Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait SPIP;
4. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dalam mencapai nilai yang sangat baik;
5. Belum adanya komitmen dan kurangnya integritas SDM dalam meningkatkan Nilai SAKIP OPD.

2.3.1. Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan, perumusan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan, sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengawasan dalam konteks pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, monitoring dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. Pengoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi sekretariat, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional;
- d. Pengelolaan penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik Daerah, serta sumber daya aparatur Inspektorat;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Inspektur mempunyai uraian tugas:

- a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Inspektorat;
- b. Merencanakan dan menetapkan kebijakan rencana strategis serta rencana kerja di bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
- c. Memimpin perumusan sasaran dan program kerja yang meliputi sekretariat, Inspektur Pembantu serta kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebijakan umum Inspektorat, norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana kerja strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (Renja), Penetapan Kinerja (Tapkin), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Inspektorat serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan dokumen-dokumen kinerja lainnya;
- e. Menjelaskan perkembangan mutakhir mengenai perubahan-perubahan teknologi dan sasaran organisasi yang dapat mempengaruhi bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan kepada staf;
- f. Menyelenggarakan monitoring, pengendalian, tindaklanjut dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
- g. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah pada Inspektorat;
- h. Mendistribusikan tugas kepada para bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- i. Menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
- j. Menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- k. Memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- l. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja Inspektorat;
- m. Membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
- n. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- p. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Inspektorat; dan
- s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran difokuskan pada pelayanan Pembinaan dan Pengawasan yang dapat meningkatkan Indikator Kinerja Nilai Sakip dan Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa permasalahan dan hambatan Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tersebut, yang timbul dari lingkungan internal dan eksternal, antara lain :

- a. Dari lingkungan internal terdiri dari :
 - Belum optimalnya jumlah aparatur pengawasan;
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan.
- b. Dari lingkungan eksternal yaitu masih kurangnya tanggapan auditan dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan masih kurang pahamnya terhadap UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hambatan yang timbul dari lingkungan internal dan eksternal tersebut diharapkan bisa diminimalisasi guna menjalankan tugas pengawasan di tahun 2025.

2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Pangandaran yaitu ***“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”*** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Pangandaran, yaitu:

- | | |
|--------|--|
| MISI 1 | Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama |
| MISI 2 | Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan |
| MISI 3 | Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan |
| MISI 4 | Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal |
| MISI 5 | Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel |
| MISI 6 | Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan |

Inspektorat Kabupaten Pangandaran, sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung Misi ke-5 Kabupaten Pangandaran yaitu : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang , Inspektorat Kabupaten Pangandaran terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Menuntut semua pihak untuk melakukan penyesuaian dalam semua aspek, agar kegiatan tetap berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Regulasi dan aturan yang mendorong diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Mulai diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Adanya komitmen bersama untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN;
2. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD, Pusdiklat BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;

3. Dukungan regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan penguatan terhadap fungsi pengawasan.

2.3.5. Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP pendukung kapabilitas pengawasan dan Meningkatkan Kompetensi dan sistem pengawasan intern pemerintah yang profesional;
2. Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan *early warning* system pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Rancangan awal RKPD Inspektorat dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Inspektorat terdiri dari 3 program, 12 kegiatan, dan 41 sub kegiatan. Urusan Pilihan Inspektorat terdiri dari 2 program, 4 kegiatan, dan 14 sub kegiatan. Urusan Pendukung 1 program, 8 Kegiatan, dan 27 sub kegiatan untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

INSPEKTORAT

No.	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
	INSPEKTORAT DAERAH				15,794,237,052	INSPEKTORAT DAERAH			9,640,000,000	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	72.25 Nilai	3,816,750,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	72.25 Nilai	1,583,000,000
			Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	3.15 Nilai				Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	3.15 Nilai	
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	15 Laporan	2,892,750,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	15 Laporan	1,280,275,000
			2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal	9 Laporan				2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal	9 Laporan	
			3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	12 Laporan				3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	12 Laporan	
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	22 Laporan	472,500,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	22 Laporan	322,895,000
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	614,250,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	148,970,000
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	74 Laporan	367,500,000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	74 Laporan	174,458,000
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	99,750,000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	173,006,000
I.1.5	Pengawasan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	40 Laporan	761,250,000	Pengawasan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	40 Laporan	113,250,000
I.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Pangandaran	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	157,500,000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Pangandaran	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	420,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	347,696,000	
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	42 Laporan	924,000,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	42 Laporan	302,725,000	
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	315,000,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	95,820,000	
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	32 Laporan	609,000,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	32 Laporan	206,905,000	
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	72 Nilai	1,399,750,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	72 Nilai	1,529,039,000	
			Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	4 Unit Kerja				Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	4 Unit Kerja		
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasann	2 Rekomendasi	63,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasann	2 Rekomendasi	606,499,000	
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	31,500,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	577,159,000	
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	31,500,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	29,340,000	
II.2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan Monev	54 Laporan	1,336,750,000	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan Monev	54 Laporan	922,540,000	
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah	131,250,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah	84,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	250,000,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	44,940,000	
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	787,500,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	748,860,000	
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	168,000,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	44,740,000	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	92 Persen	10,577,737,052	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	92 Persen	6,527,961,000	
			2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	92 Persen				2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	92 Persen		
			3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	92 Persen				3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	92 Persen		
			4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	92 Persen				4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	92 Persen		
III.1	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	92 Persen	304,500,000	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	92 Persen	100,897,000	
			Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	92 Persen				Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	92 Persen		
			Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	92 Persen				Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	92 Persen		
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	105,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	1,215,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
III.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	
III.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	
III.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12,600,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	
III.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	
III.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	136,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	80,670,000	
III.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12,600,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5,012,000	
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan baik	92 Persen	9,486,441,790	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan baik	92 Persen	5,640,268,738	
III.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	9,473,007,790	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5,626,834,738	
III.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	8,500,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	8,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
III.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1,344,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1,344,000		
III.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	3,590,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	3,590,000		
iii.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah	42 Laporan	420,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah	26 Laporan	420,000		
III.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-		
III.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-		
III.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26 Laporan	420,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26 Laporan	420,000		
III.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	52 Dokumen	340,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	52 Dokumen	340,000		
III.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	340,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	340,000		
III.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	5 Paket 4 Dokumen	171,248,884	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	5 Paket 4 Dokumen	171,248,884		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
III.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,686,083	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,686,083	
III.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31,871,728	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31,871,728	
III.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10,000,000	
III.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12,454,060	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12,454,060	
III.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000	
III.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	95,237,013	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	95,237,013	
III.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	-	
III.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah	92 Persen	210,718,964	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah	92 Persen	210,718,964	
III.6.1	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	
III.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50,718,964	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50,718,964	
III.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 Unit	160,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 Unit	160,000,000	
III.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Laporan	289,572,414	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Laporan	289,572,414	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
III.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000	
III.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72,930,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72,930,000	
III.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	215,142,414	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	215,142,414	
III.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi	51 Unit	114,495,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi	51 Unit	114,495,000	
III.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15,000,000	
III.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	88,995,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	88,995,000	
III.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	10,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	10,500,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD, serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan Tahun 2025 yang tertuang di dalam RPJMD 2021 - 2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk Tahun 2025 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangandaran diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Inspektorat Kabupaten Pangandaran

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
	INSPEKTORAT DAERAH				
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	76.25 Nilai	
			Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	3.25 Nilai	
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja dan Pengawasan Keuangan	46 Laporan	
			2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal	25 Laporan	
			3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	12 Laporan	
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	74 Laporan	
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	
I.1.5	Pengawasan Desa	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16 Laporan	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab Pangandaran	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	42 Laporan	
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	32 Laporan	
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	72 Nilai	
			Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	4 Unit Kerja	
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasann	2 Rekomendasi	
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	
II.2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan Monev	54 Laporan	
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah	
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Pangandaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	92 Persen	
			2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	92 Persen	
			3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	92 Persen	
			4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	92 Persen	
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	92 Persen	
			Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	92 Persen	
			Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	92 Persen	
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	
III.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
III.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
III.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
III.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	
III.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92 Persen	
iii.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	
iii.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	
iii.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	
iii.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	
iii.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah	26 Laporan	
iii.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26 Laporan	
iii.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	52 Dokumen	
iii.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	
iii.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah	5 Paket	
			2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	4 Dokumen	
iii.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
iii.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
iii.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	
iii.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
iii.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	
iii.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	
iii.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	
iii.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah	92 Persen	
iii.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	
iii.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 Unit	
iii.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Laporan	
iii.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
iii.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
iii.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
iii.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi	51 Unit	
iii.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
iii.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	
iii.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

KABUPATEN PANGANDARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029, dan merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan RPJPN 2025-2045. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan dari visi diatas, untuk mewujudkan Indonesia Emas2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi

digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tatakelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Pangandaran, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2025 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan masuk pada misi ke-5 yaitu: Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Sedangkan, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran berdasarkan Misi ke-5 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Satuan	Target Tahun 2025
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) Indikator : 1. Nilai SAKIP 2. Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	Nilai	19,25
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	78,50
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai <i>Quality Assurance</i> Maturitas Penyelenggaraan SPIP dari BPKP	Level	3

3.3. Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyusun program dan kegiatan untuk Tahun 2025 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah menetapkan 3 program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan (3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Inspektorat Kabupaten Pangandaran

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
	INSPEKTORAT DAERAH				9,640,000,000				17,364,089,774
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD		72.25 Nilai	1,583,000,000			76.25 Nilai	4,007,587,500
		Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD		3.15 Nilai				3.25 Nilai	
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan		15 Laporan	1,280,275,000			30 Laporan	3,037,387,500
		2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal		9 Laporan				9 Laporan	
		3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti		12 Laporan				12 Laporan	
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Pangandaran	22 Laporan	322,895,000	APBD Kabupaten		22 Laporan	496,125,000
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Pangandaran	8 Laporan	148,970,000	APBD Kabupaten		8 Laporan	644,962,500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab Pangandaran	74 Laporan	174,458,000	APBD Kabupaten		74 Laporan	385,875,000
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab Pangandaran	37 Laporan	173,006,000	APBD Kabupaten		40 Laporan	104,737,500
I.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab Pangandaran	40 Laporan	113,250,000	APBD Kabupaten		40 Laporan	799,312,500
I.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab Pangandaran	2 Kesepakatan	-	APBD Kabupaten		2 Kesepakatan	165,375,000
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Pangandaran	12 Dokumen	347,696,000	APBD Kabupaten		12 Dokumen	441,000,000
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		42 Laporan	302,725,000			42 Laporan	970,200,000
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab Pangandaran	10 Laporan	95,820,000	APBD Kabupaten		10 Laporan	330,750,000
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Pangandaran	32 Laporan	206,905,000	APBD Kabupaten		32 Laporan	639,450,000
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		72 Nilai	1,529,039,000			75 Nilai	1,446,000,000
		Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas		4 Unit Kerja				4 Unit Kerja	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		2 Rekomendasi	606,499,000			2 Rekomendasi	66,000,000
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab Pangandaran	1 Rekomendasi	577,159,000	APBD Kabupaten		1 Rekomendasi	33,000,000
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab Pangandaran	1 Rekomendasi	29,340,000	APBD Kabupaten		1 Rekomendasi	33,000,000
II.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan Monev		54 Laporan	922,540,000			54 Laporan	1,380,000,000
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Pangandaran	36 perangkat daerah	84,000,000	APBD Kabupaten		36 Perangkat Daerah	135,000,000
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Pangandaran	10 perangkat daerah	44,940,000	APBD Kabupaten		10 Perangkat Daerah	250,000,000
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Pangandaran	4 Kegiatan	748,860,000	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	825,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Pangandaran	4 perangkat daerah	44,740,000	APBD Kabupaten		4 Perangkat Daerah	170,000,000
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik 3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur 4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas		92 Persen	6,527,961,000			93 Persen	11,910,502,274
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		92 Persen	100,897,000			93 Persen	325,000,000
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Pangandaran	13 Dokumen	1,215,000	APBD Kabupaten		13 Dokumen	110,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	3,500,000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	14,000,000
III.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	3,500,000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	14,000,000
III.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	3,500,000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	14,000,000
III.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	3,500,000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	14,000,000
III.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Pangandaran	6 Laporan	80,670,000	APBD Kabupaten		4 Laporan	145,000,000
III.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Pangandaran	4 Laporan	5,012,000	APBD Kabupaten		4 Laporan	14,000,000
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		92 Persen	5,640,268,738			34 Dokumen	10,039,552,274
iii.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Pangandaran	40 Orang/bulan	5,626,834,738	APBD Kabupaten		40 Orang	9,927,552,274

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
iii.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Pangandaran	28 Dokumen	8,500,000	APBD Kabupaten		28 Dokumen	50,000,000
iii.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Pangandaran	2 Laporan	1,344,000	APBD Kabupaten		2 Laporan	38,000,000
iii.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Pangandaran	4 Laporan	3,590,000	APBD Kabupaten		4 Laporan	24,000,000
iii.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah		26 Laporan	420,000			42 Laporan	54,000,000
iii.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Pangandaran	26 Laporan	420,000	APBD Kabupaten		26 Laporan	54,000,000
iii.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		52 Dokumen	340,000			52 Dokumen	44,000,000
iii.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab Pangandaran	12 Dokumen	340,000	APBD Kabupaten		12 Dokumen	44,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
iii.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah		5 Paket	171,248,884			5 Paket	578,000,000
		2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah		4 Dokumen				4 Dokumen	
iii.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Pangandaran	1 Paket	6,686,083	APBD Kabupaten		1 Paket	14,000,000
iii.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Pangandaran	1 Paket	31,871,728	APBD Kabupaten		1 Paket	54,000,000
iii.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Pangandaran	3 Paket	10,000,000	APBD Kabupaten		3 Paket	30,000,000
iii.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Pangandaran	12 Dokumen	12,454,060	APBD Kabupaten		12 Dokumen	35,000,000
iii.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Pangandaran	12 Laporan	15,000,000	APBD Kabupaten		12 Laporan	50,000,000
iii.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Pangandaran	40 Laporan	95,237,013	APBD Kabupaten		42 Laporan	350,000,000
iii.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Pangandaran	Dokumen	-	APBD Kabupaten		12 Dokumen	45,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
iii.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah		92 Persen	210,718,964			93 Persen	308,700,000
iii.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Pangandaran	12 Unit	50,718,964	APBD Kabupaten		12 Unit	132,300,000
iii.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Kab Pangandaran	1 Unit	160,000,000	APBD Kabupaten		1 Unit	176,400,000
iii.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		12 Laporan	289,572,414			12 Laporan	305,500,000
iii.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Pangandaran	12 Laporan	1,500,000	APBD Kabupaten		12 Laporan	5,500,000
iii.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Pangandaran	12 Laporan	72,930,000	APBD Kabupaten		12 Laporan	85,000,000
iii.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Pangandaran	12 Laporan	215,142,414	APBD Kabupaten		12 Laporan	215,000,000
iii.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi		51 Unit	114,495,000			53 Unit	255,750,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
iii.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Pangandaran	1 Unit	15,000,000	APBD Kabupaten		1 Unit	30,000,000
iii.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Pangandaran	12 Unit	88,995,000	APBD Kabupaten		12 Unit	194,250,000
iii.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Pangandaran	38 Unit	10,500,000	APBD Kabupaten		40 Unit	31,500,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025

Rencana kerja program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Inspektorat Kabupaten Pangandaran merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Inspektorat kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Inspektorat. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Inspektorat pada tahun 2025 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
	INSPEKTORAT DAERAH		2,878,045,055		2,466,432,291		2,147,761,327		2,147,761,327		9,640,000,000
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	76.25 Nilai	395,750,000	0 Nilai	395,750,000	76.25 Nilai	395,750,000	76.25 Nilai	395,750,000	76.25 Nilai	1,583,000,000
		3.25 Nilai		0 Nilai		0 Nilai		0 Nilai		3.25 Nilai	
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5 Laporan	320,068,750	5 Laporan	320,068,750	5 Laporan	320,068,750	8 Laporan	320,068,750	23 Laporan	1,280,275,000
		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		7 Laporan		25 Laporan	
		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		12 Laporan	
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	80,723,750	3 Laporan	80,723,750	3 Laporan	80,723,750	6 Laporan	80,723,750	15 Laporan	322,895,000
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	37,242,500	2 Laporan	37,242,500	2 Laporan	37,242,500	2 Laporan	37,242,500	8 Laporan	148,970,000
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	18 Laporan	43,614,500	18 Laporan	43,614,500	18 Laporan	43,614,500	20 Laporan	43,614,500	74 Laporan	174,458,000
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	10 Laporan	43,251,500	10 Laporan	43,251,500	10 Laporan	43,251,500	10 Laporan	43,251,500	40 Laporan	173,006,000
I.1.5	Pengawasan Desa	4 Laporan	28,312,500	4 Laporan	28,312,500	4 Laporan	28,312,500	4 Laporan	28,312,500	16 Laporan	113,250,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
I.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	86,924,000	3 Dokumen	86,924,000	3 Dokumen	86,924,000	3 Dokumen	86,924,000	12 Dokumen	347,696,000
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	75,681,250	10 Laporan	75,681,250	10 Laporan	75,681,250	12 Laporan	75,681,250	42 Laporan	302,725,000
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	23,955,000	2 Laporan	23,955,000	2 Laporan	23,955,000	4 Laporan	23,955,000	10 Laporan	95,820,000
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	51,726,250	8 Laporan	51,726,250	8 Laporan	51,726,250	8 Laporan	51,726,250	32 Laporan	206,905,000
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMIPRB)	0 Nilai	722,244,750	0 Nilai	451,784,750	0 Nilai	177,504,750	0 Nilai	177,504,750	75 Nilai	1,529,039,000
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		4 Unit Kerja	
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	94,289,750	1 Rekomendasi	323,629,750	0 Rekomendasi	94,289,750	1 Rekomendasi	94,289,750	2 Rekomendasi	606,499,000
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	29,340,000	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	29,340,000
II.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan Monev	14 Laporan	627,955,000	20 Laporan	128,155,000	10 Laporan	83,215,000	10 Laporan	83,215,000	54 Laporan	922,540,000
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9 Perangkat Daerah	21,000,000	9 Perangkat Daerah	21,000,000	9 Perangkat Daerah	21,000,000	9 Perangkat Daerah	21,000,000	36 Perangkat Daerah	84,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0 Perangkat Daerah	-	10 Perangkat Daerah	44,940,000	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	-	10 Perangkat Daerah	44,940,000
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	562,215,000	1 Kegiatan	62,215,000	1 Kegiatan	62,215,000	1 Kegiatan	62,215,000	4 Kegiatan	748,860,000
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 Perangkat Daerah	44,740,000	0 Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	-	4 Perangkat Daerah	44,740,000
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	23.25 Persen	1,760,050,305	23.25 Persen	1,618,897,541	23.25 Persen	1,574,506,577	23.25 Persen	1,574,506,577	93 Persen	6,527,961,000
		2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	23.25 Persen		23.25 Persen		23.25 Persen		23.25 Persen		93 Persen	
		3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	23.25 Persen		23.25 Persen		23.25 Persen		23.25 Persen		93 Persen	
		4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	23.25 Persen		23.25 Persen		23.25 Persen		23.25 Persen		93 Persen	
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	23.25 Persen	21,724,250	23.25 Persen	21,724,250	23.25 Persen	28,724,250	23.25 Persen	28,724,250	93 Persen	100,897,000
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	23.25 Persen		23.25 Persen		23.25 Persen		23.25 Persen		93 Persen	
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	23.25 Persen		23.25 Persen		23.25 Persen		23.25 Persen		93 Persen	
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	303,750	3 Dokumen	303,750	3 Dokumen	303,750	4 Dokumen	303,750	13 Dokumen	1,215,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Kinerja Renja 2025	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif		Target Kinerja	Pagu Indikatif		Target Kinerja	Pagu Indikatif		Target Kinerja	Pagu Indikatif		Target Kinerja	Pagu Indikatif
III.1.2	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	-		0 Dokumen			1 Dokumen	3,500,000		0 Dokumen			1 Dokumen	3,500,000
III.1.3	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	-		0 Dokumen			0 Dokumen			1 Dokumen	3,500,000		1 Dokumen	3,500,000
III.1.4	Koordinasi dan Penyelenggaraan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	-		0 Dokumen			1 Dokumen	3,500,000		0 Dokumen			1 Dokumen	3,500,000
III.1.5	Koordinasi dan Penyelenggaraan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	-		0 Dokumen			0 Dokumen			1 Dokumen	3,500,000		1 Dokumen	3,500,000
III.1.6	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20,167,500		1 Laporan			1 Laporan	20,167,500		1 Laporan	20,167,500		4 Laporan	80,670,000
III.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,253,000		1 Laporan			1 Laporan	1,253,000		1 Laporan	1,253,000		4 Laporan	5,012,000
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dokumen	1,410,403,185		8 Dokumen			8 Dokumen	1,409,731,185		10 Dokumen	1,409,731,185		34 Dokumen	5,640,268,738
iii.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	1,406,708,685		40 Orang			40 Orang	1,406,708,685		40 Orang	1,406,708,685		40 Orang	5,626,834,738
iii.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	2,125,000		7 Dokumen			7 Dokumen	2,125,000		7 Dokumen	2,125,000		28 Dokumen	8,500,000
iii.2.3	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	672,000		1 Laporan			0 Laporan			0 Laporan			2 Laporan	1,344,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
iii.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	897,500	1 Laporan	897,500	1 Laporan	897,500	1 Laporan	897,500	4 Laporan	3,590,000
iii.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah	6 Laporan	105,000	6 Laporan	105,000	6 Laporan	105,000	8 Laporan	105,000	26 Laporan	420,000
iii.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	105,000	6 Laporan	105,000	6 Laporan	105,000	8 Laporan	105,000	26 Laporan	420,000
iii.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	85,000	3 Dokumen	85,000	3 Dokumen	85,000	3 Dokumen	85,000	12 Dokumen	340,000
iii.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	85,000	3 Dokumen	85,000	3 Dokumen	85,000	3 Dokumen	85,000	12 Dokumen	340,000
iii.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah	1 Paket	66,716,017	0 Paket	34,844,289	0 Paket	34,844,289	4 Paket	34,844,289	5 Paket	171,248,884
		2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	
iii.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1,671,521	0 Paket	1,671,521	0 Paket	1,671,521	1 Paket	1,671,521	1 Paket	6,686,083
iii.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31,871,728	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	31,871,728
iii.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	2,500,000	0 Paket	2,500,000	0 Paket	2,500,000	3 Paket	2,500,000	3 Paket	10,000,000
iii.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3,113,515	3 Dokumen	3,113,515	3 Dokumen	3,113,515	3 Dokumen	3,113,515	12 Dokumen	12,454,060

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
iii.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3,750,000	3 Laporan	3,750,000	3 Laporan	3,750,000	3 Laporan	3,750,000	12 Laporan	15,000,000
iii.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	23,809,253	10 Laporan	23,809,253	10 Laporan	23,809,253	12 Laporan	23,809,253	42 Laporan	95,237,013
iii.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	160,000,000	93 Persen	50,718,964	0 Persen	0	0 Persen	0	93 Persen	210,718,964
iii.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	12 Unit	50,718,964	0 Unit		0 Unit		12 Unit	50,718,964
iii.6.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 Unit	160,000,000	0 Unit	0	0 Unit		0 Unit		1 Unit	160,000,000
iii.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	3 Laporan	72,393,104	3 Laporan	72,393,104	3 Laporan	72,393,104	3 Laporan	72,393,104	12 Laporan	289,572,414
iii.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	375,000	3 Laporan	375,000	3 Laporan	375,000	3 Laporan	375,000	12 Laporan	1,500,000
iii.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	18,232,500	3 Laporan	18,232,500	3 Laporan	18,232,500	3 Laporan	18,232,500	12 Laporan	72,930,000
iii.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	53,785,604	3 Laporan	53,785,604	3 Laporan	53,785,604	3 Laporan	53,785,604	12 Laporan	215,142,414
iii.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi	3 Unit	28,623,750	3 Unit	28,623,750	3 Unit	28,623,750	18 Unit	28,623,750	27 Unit	114,495,000
iii.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0 Unit	3,750,000	0 Unit	3,750,000	0 Unit	3,750,000	1 Unit	3,750,000	1 Unit	15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
iii.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	22,248,750	0 Unit	22,248,750	0 Unit	22,248,750	12 Unit	22,248,750	12 Unit	88,995,000
iii.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2,625,000	3 Unit	2,625,000	3 Unit	2,625,000	5 Unit	2,625,000	14 Unit	10,500,000

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2025.

Penyusunan Renja Inspektorat sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Inspektorat sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2025 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Nilai Sakip dan Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi di Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 25 Juli 2024

Plt. INSPEKTUR

KABUPATEN PANGANDARAN



H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., M.P

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660902 199601 1 002